



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. X6 No. 8 Jakarta Selatan
Telepon : 021-5224658, Faksimili : 021-5225044,
Website : www.imigrasi.go.id email: keuangan.imigrasi@gmail.com

Nomor : IMI.1-KU.01.05- 1583
Sifat : Segera
Hal : Persetujuan Revisi Anggaran TA. 2018

13 April 2018

Yth. Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Meulaboh
di Meulaboh

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor: W1.IMI.5.PR.01.04- 00377 tanggal 03 April 2018 perihal Usulan Revisi Anggaran, bersama ini disampaikan hal – hal sebagai berikut:

1. Revisi anggaran perlu dilakukan karena:
 - a. Perubahan kondisi dan prioritas kebutuhan anggaran yang berakibat pada percepatan pencapaian kinerja Kementerian/Lembaga;
 - b. Pemenuhan kebutuhan operasional dalam menunjang tugas dan fungsi Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas II Meulaboh;
2. Usulan revisi anggaran yang diajukan adalah:
 - a. Pergeseran anggaran dalam 1 (satu) Keluaran (*output*) dalam 1 (satu) Satker yang sama dalam 1 (satu) wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
 - b. Perubahan detail belanja pada:
 - 1) *Output* 5254.001 Pengawasan Keimigrasian *Sub Output* 001.001 Pengawasan Administratif sebesar Rp.40.128.000,- pergeseran anggaran dimaksud dipenuhi dari *Sub Output* 001.U01 Penyelidikan Intelijen Keimigrasian di Aceh sebesar (Rp.6.828.000,-) dan *Sub Output* 001.U35 Operasi Mandiri Dalam Rangka Pengawasan Lapangan di Aceh sebesar (Rp.33.300.000,-)
 - 2) *Output* 5254.008 Penerbitan Dokumen Keimigrasian Bagi WNI Komponen 051 Huruf B Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Paspor Calon Jamaah Haji Tahun 2018 sebesar Rp.8.910.000,- pergeseran anggaran dimaksud dipenuhi dari Komponen 051 Huruf A sebesar (Rp.8.910.000,-)
 - 3) *Output* 5254.013 Penyidikan Keimigrasian sebesar Rp.22.623.000,- antara lain pada:
 - (a) *Sub Output* 013.U01.055 Pemeriksaan sebesar Rp.17.423.000,-
 - (b) *Sub Output* 013.U01.056 Penyerahan Berkas Perkara sebesar Rp.1.200.000,-
 - (c) *Sub Output* 013.U01.057 Penyerahan Tersangka dan Alat Bukti sebesar Rp.4.000.000,-Pergeseran anggaran dimaksud dipenuhi dari:
 - (a) *Sub Output* 013.U01.051 Penyelidikan sebesar (Rp.13.778.000,-)
 - (b) *Sub Output* 013.U01.052 Permulaan sebesar (Rp.1.069.000,-)
 - (c) *Sub Output* 013.U01.053 Olah TKP sebesar (Rp.2.298.000,-)
 - (d) *Sub Output* 013.U01.054 Upaya Paksa sebesar (Rp.5.478.000,-)
 - 4) *Output* 5254.951 Layanan Internal (*Overhead*) *Sub Output* 951.001.053 Pengelolaan Kepegawaian Komponen 053 Huruf B Kegiatan Hari Bhakti Imigrasi sebesar Rp.28.732.000,- pergeseran anggaran dimaksud dipenuhi dari Komponen 053 Huruf A sebesar (Rp.28.732.000,-)
 - 5) *Output* 5254.994 Layanan Perkantoran Komponen 002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor sebesar Rp.1.760.000,- antara lain pada:
 - (a) Huruf F Pemeliharaan Perlengkapan dan Sarana Perkantoran sebesar Rp.320.000,-

3. Pergeseran anggaran tersebut bukan dari Hasil Optimalisasi/Sisa Anggaran Kontraktual atau Sisa Anggaran Swakelola.

Memperhatikan hal – hal tersebut di atas setelah dilakukan pembahasan usulan revisi anggaran yang diajukan kepada Direktorat Jenderal Imigrasi, pada prinsipnya usulan revisi satker Kantor Imigrasi Kelas II Meulaboh dapat dipertimbangkan, dan agar satker Kantor Imigrasi Kelas II Meulaboh segera mengusulkan revisi dimaksud untuk mendapat persetujuan. Dan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.02/2018 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2018 sesuai dengan Pasal 10 ayat (2) huruf B bahwa *pergeseran anggaran dalam 1 (satu) Satker dalam 1 (satu) wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan merupakan kewenangan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan setempat.*

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



an/Direktur Jenderal Imigrasi
Sekretaris Direktorat Jenderal,

Erlik Bambang L.
NIP. 195901021984031001

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Imigrasi;
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh;
3. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Aceh;
4. Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh.

